

**IMPLEMENTASI PELAYANAN PUBLIK BERBASIS DIGITAL SMART  
KAMPUNG DI DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN  
KABUPATEN SINJAI PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Andi Aditya Pratama

30.1158

*Asdaf Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan*

*Program Studi Kebijakan Publik*

*Email: andiadityapratama01@gmail.com*

Pembimbing Skripsi : Dr. Drs Andi Azikin, M.Si

**ABSTRACT**

**Problem Statement/Background (GAP):** *In the Industrial Revolution 4.0, the Government is required to maximize the use of technology by transforming it for the better in public services to the community. Supported by Presidential Regulation Number 95 of 2018 concerning Electronic-Based Government Systems and the 2018-2023 Sinjai Regency RPJMD, the Sinjai Regency Government is implementing innovation in digital-based public services in the form of a website, namely SMART KAMPUNG. Purpose:* *The purpose of this study was to identify and analyze the Implementation of the SMART KAMPUNG Digital-Based Public Service Program at the Informatics and Encryption Communication Service, Sinjai Regency, South Sulawesi Province, the inhibiting factors and the government's efforts to overcome obstacles. Merielle S. Grindle explained that there are two variables in policy implementation, namely the policy content and the implementation environment. Method:* *This study uses a qualitative descriptive method with an inductive approach. Data collection techniques through observation, interviews and documentation. Result:* *From the research it was found that the implementation of the SMART KAMPUNG program had been carried out but had not been carried out properly and of course there were still some obstacles/obstacles that occurred, this happened because of several factors that became obstacles such as uneven socialization, unstable networks, and sources of information. meager human resources. Conclusion:* *Therefore, it is necessary to hold a thorough socialization, collaboration with the PMD Service, and training for the community.*

**Keywords:** *Implementation, Public Service, SMART KAMPUNG*

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Dalam Revolusi Industri 4.0, Pemerintah dituntut memaksimalkan penggunaan teknologi dengan bertransformasi menjadi lebih baik dalam pelayanan publik kepada masyarakat. Didukung melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 Pemerintah Kabupaten Sinjai menjalankan inovasi dalam pelayanan publik berbasis digital berbentuk website yaitu SMART KAMPUNG. **Tujuan:** Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Program Pelayanan Publik Berbasis Digital SMART KAMPUNG di Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan, faktor penghambat serta upaya pemerintah untuk mengatasi hambatan. Merielle S. Grindle menjelaskan bahwa terdapat dua variabel dalam implementasi kebijakan yaitu isi kebijakan dan lingkungan implementasi. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. **Hasil:** Dari penelitian diperoleh hasil bahwa implementasi program SMART KAMPUNG telah dilaksanakan namun belum terlaksana dengan baik dan tentunya masih ada beberapa hambatan/kendala yang terjadi, hal ini terjadi karena adanya beberapa faktor yang menjadi penghambat seperti sosialisasi yang tidak merata, jaringan yang tidak stabil, dan sumber daya manusia yang seadanya. **Kesimpulan:** Oleh karena itu, perlu diadakan sosialisasi secara menyeluruh, Kerjasama dengan Dinas PMD, dan pelatihan kepada masyarakat.

**Kata Kunci:** Implementasi, Pelayanan Publik, SMART KAMPUNG

### I. PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Dalam Revolusi Industri 4.0, Pemerintah dituntut memaksimalkan penggunaan teknologi dengan bertransformasi menjadi lebih baik dalam pelayanan publik kepada masyarakat. Tetapi dalam praktiknya, pemberian pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah masih mengalami permasalahan. Menurut data dari Ombudsman berbagai permasalahan dalam pelayanan publik telah banyak terjadi baik di tingkat nasional hingga ke tingkat daerah. Gejala ini mulai tampak dengan ditandai adanya protes dan demonstrasi oleh berbagai komponen masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah berkaitan dengan prosedur dan mekanisme kerja pelayanan yang berbelit-belit, waktu yang 2 lama, kurang informasi, pemerintah seakan kaku, kurang konsisten dan terbatasnya sarana dan prasarana. Dalam mengembangkan inovasi pelayanan dalam tata kelola pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Sinjai menunjukkan komitmen kemajuan inovasi pada berbagai sektor, hingga pada adopsi teknologi informasi atau teknologi digital dalam pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Sinjai mengembangkan suatu kebijakan berbasis digital yaitu program Smart



Kampung sebagai solusi dalam memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat berbasis elektronik atau digital. Smart Kampung merupakan program pengembangan desa terintegrasi berbasis website yang memadukan antara penggunaan teknologi digital, kegiatan ekonomi produktif, kegiatan ekonomi kreatif, dan pelayanan tepat dan cepat. Program Smart Kampung merupakan bagian dari program-program pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sinjai tahun 2018-2023 dalam bentuk program pemanfaatan teknologi digital. Program Smart Kampung ditetapkan berdasarkan Inpres no 3 tahun 2003 dan Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 131 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Inovasi pelayanan publik Smart Kampung merupakan program unggulan Bupati Sinjai dalam meningkatkan pelayanan publik mencakup pengembangan website desa yang dapat menjadi sumber informasi publik bagi masyarakat, bahkan menjadi bagian dari pelayanan administrasi yang berbasis digital atau online. Website tersebut juga dapat menjadi rujukan bagi masyarakat di luar desa untuk mengetahui potensi desa yang ada, bahkan dapat menjadi media promosi produk unggulan yang ada. Smart Kampung di Kabupaten Sinjai sudah berjalan sejak Tahun 2019 dan diluncurkan secara resmi pada tahun 2021. Instansi penanggungjawab dalam hal ini Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai telah melakukan pelatihan, bimbingan serta pendampingan dalam pembuatan dan pengelolaan website desa.id bagi 67 desa yang ada di Kabupaten Sinjai.

## **1.2 Kesenjangan Masalah yang Dihadapi**

Program Smart Kampung bertujuan untuk mempermudah pelayanan pemerintah kepada masyarakat berbasis website. Melalui website desa.id semua desa dapat dengan mudah menampilkan semua potensi yang ada di desanya, selain itu dapat memberi akses kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh layanan publik. Menurut data yang diambil dari Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten yaitu daftar website desa Kabupaten Sinjai dinas komunikasi informatika dan persandian di Kabupaten Sinjai sampai saat ini dari 67 desa, sudah ada 34 desa yang menjalankan program Smart Kampung dan diantara 34 desa tersebut baru 32 desa yang sudah memiliki website desa yang aktif dan dapat diakses, 2 desa sudah memiliki website desa namun belum aktif dan belum bisa diakses. Dari jumlah desa yang ada pada Kabupaten Sinjai sebanyak 33 desa belum memiliki website desa sama sekali.

Dari data di atas baru sebagian besar desa di Kabupaten Sinjai yang sudah memiliki domain desa.id atau sudah memiliki website desa, beberapa desa yang sudah memiliki website desa sebagian besar adalah desa wisata atau daerah wisata. Ada beberapa kendala yang dialami oleh desa-desa yang belum mengakses domain atau desa yang belum memiliki website desa, sedangkan pihak Diskominfo Kabupaten Sinjai sedia setiap saat untuk membimbing desa-desa agar memiliki website dan menjalankan website desanya. Namun kesadaran Aparatur pemerintah desa dianggap masih kurang

peka karena mereka semua terlalu bergantung kepada pihak ketiga, jika saja ada kemauan dari pihak pemerintah desa pasti program Smart Kampung ini akan terlaksana dengan cepat.

### **1.3 Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang dilakukan berdasarkan beberapa penelitian terdahulu. Penelitian Ananda Putri Mahardhika dengan judul Implementasi Program Smart Kampung Bidang Pelayanan Publik Di Desa Kampung Anyar yang menemukan bahwa implementasi program smart kampung bidang pelayanan publik sudah berjalan dengan baik mengingat tujuannya kepada masyarakat agar efektif dan efisien melalui integrasi program kerja SKPD yang dilakukan dilingkup desa (Mahardika 2018). Selanjutnya penelitian oleh Herlisa Maulidia dengan judul Implementasi Program Smart Kampung (Desa Tamansari Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi) yang menemukan bahwa program smart kampung Desa Tamansari dalam pengimplementasiannya sudah baik. Melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam aspek pengembangan wisata, perekonomian masyarakat meningkat (Maulidia 2019). Penelitian oleh Siti Komsatun dengan judul Inovasi Pelayanan Publik Melalui Penerapan Program Smart Kampung Di Kabupaten Banyuwangi yang menemukan bahwa melalui program smart kampung dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kinerja pemerintah desa tetapi perlu diperbaiki dari segi perkembangan aplikasi dan jaringan (Komsatun 2018).

### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penelitian ini memiliki konsep yang hampir sama dengan penelitian sebelumnya namun peneliti pada penelitian ini melihat dari dua sisi yang terpisahkan dalam penelitian sebelumnya, yaitu dari sisi implementasi pelaksanaannya dan inovasi pelayanannya. Peneliti lebih cenderung kepada bagaimana pelaksanaan dan penerapan program Smart Kampung ini dalam pelayanan publik berbasis digital di kabupaten Sinjai.

### **1.5 Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana implementasi program Smart Kampung melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai serta faktor pendukung dan faktor penghambat dari implementasi program Smart Kampung di Kabupaten Sinjai, lalu untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sinjai dalam mengatasi hambatan dalam implementasi Pelayanan Smart Kampung.

## **II. METODE**

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode penelitian kualitatif yang sifatnya deskriptif dengan pendekatan induktif. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif, bertujuan untuk mempermudah peneliti untuk menyesuaikan apabila adanya hal tidak terduga terkait fenomena atau fakta yang terjadi dilokasi penelitian. Karena peneliti akan mencari gambaran secara nyata menyangkut



kendala terkait permasalahan yang akan diteliti. Penelitian kualitatif menekankan pada makna, penalaran, definisi kondisi tertentu serta banyak meneliti hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari (Rukin 2019:6). Sumber data atau subjek dari mana data diperoleh yaitu sumber data primer dan data sekunder yang didapatkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi (Arikunto 2013:172). Data yang sudah didapatkan, kemudian dianalisis dengan Teknik analisis Miles and Huberman yaitu dengan reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan (Sugiyono, 2016).

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penulis menganalisis implementasi pelayanan public berbasis digital *smart kampung* di dinas komunikasi informatika dan persandian Kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan dengan menganalisis isi kebijakan dan konteks kebijakan. Adapun pembahasan dapat dilihat pada sub bab berikut.

#### **3.1 Isi Kebijakan (*Content of Policy*)**

Pada variabel ini terdapat 6 indikator yang akan dijelaskan yaitu, hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi terkait dengan analisis implementasi program Smart Kampung di Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai

##### **3.1.1 Kepentingan yang Dipengaruhi**

dalam proses implementasi program ini yang dimaksud dengan kepentingan yang dipengaruhi oleh program yaitu bagaimana peran dari pemerintah dalam hal ini Diskominfo Kabupaten Sinjai dan aparatur pemerintahan desa untuk menjalankan dan mengurus program Smart Kampung untuk meningkatkan pelayanan publik. Pemerintah Kabupaten Sinjai sudah cukup mendukung program ini namun masih ada beberapa kendala yang menjadi penghambat bagi program ini. Dan juga terhadap masyarakat masih ada masyarakat yang belum mengerti akan teknologi digital dimana mereka tidak mengerti menggunakan website desa dan internet mereka masih melakukan pelayanan di kantor desa.

##### **3.1.2 Tipe Manfaat**

Program SMART KAMPUNG sangat bermanfaat bagi masyarakat jika betul betul terlaksana dengan baik karena program ini dapat mempermudah masyarakat dalam mengakses pelayanan dan dapat mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Upaya pemerintah dalam hal ini Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai telah mendukung penuh pelaksanaan program ini agar seluruh masyarakat desa di Kabupaten Sinjai dapat merasakan manfaat dari program ini. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang peneliti dapatkan pada implementasi program SMART KAMPUNG ini sudah baik karena memberikan pelayanan yang lebih baik dari pelayanan sebelumnya.

### **3.1.3 Derajat Perubahan**

Suatu program tentunya tidak lepas dari adanya sebuah tujuan yang ingin dicapai. Manfaat yang dihasilkan ini sangat berkaitan dengan derajat perubahan yang diharapkan dari program ini. Dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa derajat perubahan yang diinginkan dari program SMART KAMPUNG ini sangat baik karena pemerintah ingin meningkatkan kualitas pelayanan publik terkhusus didesa dari pelayanan offline ke pelayanan online, meskipun dalam pelaksanaannya masih ada kendala namun program ini sudah sangat baik.

### **3.1.4 Kedudukan Pembuat Kebijakan**

Pada RPJMD Kabupaten Sinjai tahun 2018-2023 mengenai program SMART KAMPUNG, kedudukan pembuat kebijakan dalam hal ini yaitu pemerintah eksekutif dalam hal ini Bupati Kabupaten Sinjai. Selanjutnya di tindak lanjuti oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai sesuai dengan tugas dan fungsinya. Namun untuk mencapai keberhasilan program ini harus ada dukungan atau support dari instansi lain. Harus ada koordinasi antar instansi dalam pelaksanaan program ini agar lebih efisien dan efektif.

### **3.1.5 Pelaksana Program**

Pada suatu implementasi program, siapa yang menjadi pelaksana program akan menjadi penentu dari tercapainya tujuan dari suatu program, Suatu program dapat berhasil apabila birokrasi yang dijalankan sesuai dengan pembagian tugas yang jelas serta kepatuhan dari pelaksana program. Pelaksana program yang utama dalam hal ini adalah Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian serta seluruh perangkat desa yang ada di Kabupaten Sinjai.

### **3.1.6 Sumber Daya yang Disediakan**

Dalam melaksanakan suatu kebijakan terdapat sumber daya yang digunakan untuk dapat menjalankan sebuah kebijakan. Kebutuhan sumber daya yang mendukung pelaksanaan suatu program merupakan hal yang utama karena dapat memberikan dampak dalam mencapai tujuan kinerja yang efektif dan efisien. Dalam implementasi program pelayanan smart kampung ini terdapat sumber daya manusia dan sarana prasarana yang telah mendukung proses penyelenggaraan program smart kampung di Kabupaten Sinjai.

## **3.2 Konteks Kebijakan (Content of Policy)**

Konteks kebijakan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu lingkungan yang mempengaruhi implementasi program SMART KAMPUNG. Dalam sebuah lingkungan implementasi terdapat 3 indikator yaitu sebagai berikut:

### **3.2.1 Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi Aktor yang Terlibat**

Pelaksanaan kebijakan tidak pernah lepas dari pengaruh kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, baik pembuatan kebijakan, pelaksanaan kebijakan hingga pihak diluar kebijakan baik itu langsung maupun tidak



langsung. Indikator dari konteks kebijakan yaitu kepuasaan, kepentingan, dan strategi pihak yang terlibat. Maksud dari hal ini adalah kewenangan yang dimiliki oleh Diskominfo dalam implementasi program SMART KAMPUNG serta strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan dari program ini. Aktor utama atau pihak yang berpengaruh dalam pelaksanaan program SMART KAMPUNG ini adalah Kepala Dinas Diskominfo namun untuk menjalankan program ini terdapat aktor lain yang berpengaruh dalam menjalankan program ini yaitu Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika Diskominfo dan Kepala Seksi E-Government dan aparatur pemerintah desa yang dipimpin oleh Kepala Desa

### **3.2.2 Karakteristik Lembaga Penguasa**

Pada implementasi kebijakan yang sudah dibuat, tentunya tidak lepas dari karakteristik pemangku kepentingan dalam hal ini konsisten dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsinya masing masing. Berjalannya program SMART KAMPUNG ini di pengaruhi oleh sikap dari pegawai atau aparat Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai dan juga aparat pemerintah desa tentang bagaimana sikap mereka menjalankan program SMART KAMPUNG ini. Juga Kedisiplinan dalam menjalankan program ini karena website itu harus dijalankan dengan betul betul detail karena tiap saat pasti ada notif pelayanan.

### **3.2.3 Kepatuhan dan Daya Tanggap**

Tingkat kepatuhan dan respon pelaksana kebijakan merupakan bentuk dukungan yang berpengaruh dalam suatu implementasi program. Merile S. Grindle mengemukakan bahwa indikator terakhir dalam dimensi konteks kebijakan ini juga di tentukan oleh sejauh mana kepatuhan dan respon pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan. Dari hasil observasi peneliti pada dinas Komunikas Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai menunjukkan kepatuhan serta daya tanggap pihak Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai sudah cukup baik. Berbeda dengan pegawai pemerintahan desa yang masih kurang disiplin dalam menjalankan tugasnya, kedisiplinan menjadi faktor utama dalam keberhasilan suatu program juga konsistensi dalam melaksanakan program ini.

### **3.3 Faktor Penghambat Implementasi Pelayanan Publik Berbasis Digital SMART KAMPUNG di Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pengumpulan data dengan melakukan wawancara dan observasi dari penelitian ini diketahui bahwa Faktor Penghambat Implementasi Pelayanan Publik Berbasis Digital SMART KAMPUNG di Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai Yaitu ;

1. Sarana dan prasarana jaringan internet belum stabil
2. Kurangnya sosialisasi antara pihak pelaksana dan pihak penerima

3. Kualitas sumber daya manusia yang masih kurang terutama dalam pemahaman akan teknologi
4. Belum adanya peraturan daerah atau peraturan Bupati yang melatarbelakangi program SMART KAMPUNG
5. Kurangnya kesadaran pemerintah desa sebagai fokus utama dari program SMART KAMPUNG.

### **3.4 Upaya Pemerintah Mengatasi Hambatan Dalam Implementasi Pelayanan Publik Berbasis Digital SMART KAMPUNG di Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai**

Untuk melaksanakan dan mewujudkan tujuan dari program SMART KAMPUNG di Kabupaten Sinjai bukanlah suatu hal yang mudah. Dalam pelaksanaannya dilapangan masih terdapat banyak hambatan yang harus di perbaiki. Sebagai wujud tanggungjawab atas tugas pokok dan funhsi di Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai melakukan upaya sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi kepada seluruh kepala desa melalui via daring atau lewat zoom meeting agar masyarakat paham akan pentingnya program SMART KAMPUNG sehingga dapat menjadi hal pendukung agar semua pihak dapat menjalankan program ini semaksimal mungkin.
2. memberikan pembimbingan pembuatan dan pengelolaan website kepada seluruh perangkat desa di Kabupaten Sinjai. Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan pemahaman dan pembelajaran kepada pihak perangkat desa sebagi pelaksana dari program SMART KAMPUNG untuk membuat dan menjalankan website desanya.
3. melaksanakan kegiatan monitoring dan pendataan jaringan website desa-desa yang ada pada kabupaten sinjai yang dilakukan secara langsung oleh tim yang telah dibentuk. Monitoring dan pendataan dilakukan untuk melihat kendala dan permasalahan yang dialami oleh pemerintah desa dalam menjalankan program pelayanan publik berbasis digital SMART KAMPUNG.
4. mengadakan kegiatan perlombaan penilaian website desa tingkat Kabupaten Sinjai yang biasanya dilaksanakan baru akhir tahun atau pada bulan desember dengan tujuan untuk mengevaluasi pengembangan website desa dan untuk memberikan motivasi kepada pihak aparatur pemerintah desa untuk menjalankan dan memiliki website desanya.

### **3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Implementasi Pelayanan Publik Berbasis Digital SMART KAMPUNG di Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai. Penelitian dilakukan dengan menganalisis isi kebijakan dan konteks kebijakan. Smart Kampung merupakan program pengembangan desa terintegrasi yang memadukan antara penggunaan teknologi digital, kegiatan ekonomi produktif, kegiatan ekonomi kreatif, dan pelayanan tepat dan cepat.



Smart Kampung memberikan kemudahan dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama di bidang pelayanan pemerintahan desa. Semua program pemerintahan desa yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien. Penelitian yang dilakukan oleh Ananda Putri Mahardhika pada tahun 2018 terkait Implementasi Program Smart Kampung Bidang Pelayanan Publik Di Desa Kampung Anyar. Selanjutnya penelitian oleh Herlisa Maulidia pada tahun 2019 terkait Implementasi Program Smart Kampung (Desa Tamansari Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi). Penelitian oleh Siti Komsatun pada tahun 2018 terkait Inovasi Pelayanan Publik Melalui Penerapan Program Smart Kampung Di Kabupaten Banyuwangi.

Ketiga penelitian tersebut meneliti pada lokus yang berbeda-beda namun kondisi waktu yang dilakukan penelitian terbaru yaitu 2019 sedangkan penelitian yang penulis lakukan dari tahun 2022-2023 dimana penelitian ini melihat dari dua sisi yang terpisahkan dalam penelitian sebelumnya, yaitu dari sisi implementasi pelaksanaannya dan inovasi pelayanannya. Peneliti lebih cenderung kepada bagaimana pelaksanaan dan penerapan program Smart Kampung ini dalam pelayanan publik berbasis digital di kabupaten Sinjai.

### **3.6 Diskusi Temuan Menarik Lainnya**

Smart Kampung di Kabupaten Sinjai sudah berjalan sejak Tahun 2019 dan diluncurkan secara resmi pada tahun 2021. Instansi penanggungjawab dalam hal ini Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai telah melakukan pelatihan, bimbingan serta pendampingan dalam pembuatan dan pengelolaan website desa.id bagi 67 desa yang ada di Kabupaten Sinjai. Program SMART KAMPUNG dilaksanakan berdasarkan RPJMD kabupaten Sinjai dan visi misi pemerintah Kabupaten Sinjai sedangkan belum ada Peraturan Bupati yang mendasari pelaksanaan program ini, seharusnya pemerintah mengeluarkan Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati agar pelaksanaannya dapat lebih terarah dan efektif.

## **IV. KESIMPULAN**

Penulis menyimpulkan Implementasi Pelayanan Publik Berbasis Digital SMART KAMPUNG di Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai sudah cukup baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan menganalisis isi kebijakan dan konteks kebijakan. Terdapat faktor penghambat dalam implementasi program pelayanan SMART KAMPUNG yaitu: a) Sarana dan prasarana jaringan internet belum stabil; b) Kurangnya sosialisasi antara pihak pelaksana dan pihak penerima; c) Kualitas sumber daya manusia yang masih kurang terutama dalam pemahaman akan teknologi; d) Belum adanya peraturan daerah atau peraturan Bupati yang melatarbelakangi program SMART KAMPUNG; e) Kurangnya kesadaran pemerintah desa sebagai fokus utama dari program SMART KAMPUNG. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai dalam mengatasi hambatan tersebut yaitu: a) Melakukan sosialisasi kepada seluruh kepala desa melalui via daring atau lewat zoom

meeting agar masyarakat paham akan pentingnya program SMART KAMPUNG sehingga dapat menjadi hal pendukung agar semua pihak dapat menjalankan program ini semaksimal mungkin; b) memberikan pembimbingan pembuatan dan pengelolaan website kepada seluruh perangkat desa di Kabupaten Sinjai. Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan pemahaman dan pembelajaran kepada pihak perangkat desa sebagai pelaksana dari program SMART KAMPUNG untuk membuat dan menjalankan website desanya; c) melaksanakan kegiatan monitoring dan pendataan jaringan website desa-desa yang ada pada kabupaten sinjai yang dilakukan secara langsung oleh tim yang telah dibentuk. Monitoring dan pendataan dilakukan untuk melihat kendala dan permasalahan yang dialami oleh pemerintah desa dalam menjalankan program pelayanan publik berbasis digital SMART KAMPUNG; d) mengadakan kegiatan perlombaan penilaian website desa tingkat Kabupaten Sinjai yang biasanya dilaksanakan baru akhir tahun atau pada bulan desember dengan tujuan untuk mengevaluasi pengembangan website desa dan untuk memberikan motivasi kepada pihak aparatur pemerintah desa untuk menjalankan dan memiliki website desanya.

**Keterbatasan Penelitian:** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu penelitian serta kemampuan peneliti terkait mendapatkan informasi lebih detail dan menyeluruh akibat dari keterbatasan pengetahuan yang dimiliki oleh peneliti.

**Arah Masa Depan Penelitian (future work):** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan terkait faktor secara detail terutama upaya mengatasi hambatan dalam implementasi program SMART KAMPUNG sehingga dapat menjadi acuan bagi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai beserta jajarannya dan Kepala Desa serta masyarakat yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. (2013). Manajemen Penelitian. Jakarta: Bhineka Cipta.
- Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Grindle, Merilee S. 1980. Politics and Policy Implementation in The Third World. Princeton University Press
- Rukin. (2019). Metodologi Penelitian Kualitatif. Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendikia Indonesia.
- Ananda Putri Mahardhika, 2018. Implementasi kampung pintar program pelayanan publik di desa kampung anyar.
- Milles, M. B., Huberman, A.M. 1994. Data Management and Analysis Methods. California: Sage Thousand Oaks.
- HERLISA MAULIDIA 2019, Implementasi Program Smart Kampung (Desa Tamansari Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi)
- Siti Komsatun 2017, Inovasi Pelayanan Publik Melalui Penerapan Program Smart Kampung Di Kabupaten Banyuwangi



<https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17187/instruksi-presidennomor-3-tahun-2003/document>

<https://ombudsman.go.id>

